

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kalimantan Barat merupakan provinsi yang memiliki luas seperlima dari Pulau Kalimantan.¹ Kota Pontianak merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Barat. Kota ini memiliki keunikan yaitu, letaknya tepat pada garis khatulistiwa dan dikelilingi oleh Sungai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang di Kalimantan Barat.²

Pada perkembangannya Kesultanan Pontianak merupakan wilayah yang mampu menyerap perjumpaan budaya dengan wilayah nusantara lainnya.³ Kesultanan Pontianak didirikan oleh Syarif Abdurrahman Alkadrie pada 23 Oktober 1771 dengan dibantu oleh keluarga dan pengikutnya. Lokasi berdirinya Kesultanan Pontianak tepat di pertemuan Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak.⁴

Kesultanan Pontianak merupakan kesultanan termuda di Kalimantan Barat, namun mampu menjadi pemersatu wilayah Kalimantan Barat. Posisinya

¹ Ja'achmad, *Geografi Budaya Daerah Kalimantan Barat*, Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978, hlm. 5.

² Syafaruddin Usman, *Kota Pontianak: Doloe-Kini-Mendatang*, Pontianak: PT. Mitra Bangun Kota, 2016, hlm. 19.

³ Hassanudin, *Politik dan Perdagangan Kolonial Belanda di Pontianak*, Patanjala Vol. 8 No. 2 Juni 2016, hlm. 204.

⁴ Syafaruddin Usman, *Kota Pontianak: Doloe-Kini-Mendatang*, *op. cit.* hlm. 20.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

yang strategis membuat Kesultanan Pontianak memiliki keuntungan dalam segi politis dan geo-strategis.⁵

Perkembangan pemerintahan di Pontianak tidak lepas dari bantuan VOC. Pihak VOC telah memberikan banyak bantuan kepada Sultan Syarif Abdurrahman diantaranya dalam menguasai Kerajaan Sanggau pada 26 Maret 1778. Upaya yang dilakukan VOC ini dimanfaatkan untuk memperkuat pengaruhnya di Pontianak. Pada saat itu Gubernur Jendral Reiner de Klerk mengutus Willem Adrian Palm untuk melakukan hubungan dagang dan meningkatkan keamanan di Pontianak. Willem Adrian Palm juga diangkat sebagai perwakilan VOC di Pontianak.⁶ Ketertarikan VOC untuk memperkuat pengaruhnya di Kalimantan Barat lebih berdasarkan pada faktor perdagangan. Pada tanggal 5 Juli 1779 VOC berusaha menguasai wilayah Kalimantan Barat dengan melakukan perjanjian atau kontrak dengan Kesultanan Pontianak.⁷

Kepemimpinan Sultan Syarif Abdurrahman yang berambisi memperluas wilayah kekuasaan, memberikan pengaruh pada sumber ekonomi yang mengalir ke Pontianak, diantaranya meliputi hasil hutan, biji besi dan lainnya.⁸ Pemerintah Hindia Belanda melakukan perjanjian dengan Kesultanan Pontianak. Isi dari

⁵ *Ibid.*, hlm. 22.

⁶ Hassanudin, *Politik dan Perdagangan Kolonial Belanda di Pontianak*, *op. cit.* hlm. 206.

⁷ *Ibid.*, hlm. 204.

⁸ Lisyawati, dkk., *Kota Pontianak Sebagai Bandar Dagang di Jalur Sutra*, Jakarta : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jendral Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, hlm. 3.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

perjanjian ini diantaranya adalah dalam hal hak menentukan calon sultan dan para pembesar kesultanan.⁹

Pemerintah Pontianak telah diikat oleh perjanjian yang dilaksanakan pada tahun 1819, 1822, dan 1823. Perjanjian-perjanjian tersebut mempertegas kesepakatan antara Pemerintah Hindia Belanda dan Kesultanan Pontianak dalam memperluas wilayah kekuasaan Pontianak. Hal ini berakibat Pemerintah Hindia Belanda mendapatkan keuntungan melalui bea cukai dan monopoli perdagangan serta hak politik untuk mengatur kekuasaan Kesultanan Pontianak.¹⁰

Pemerintah Hindia Belanda mengembangkan Pontianak menjadi kota yang sesuai dengan keperluan politik pemerintahannya. Pola tata ruang kota membentuk unsur adanya *Residentweg*, *Kantor Residentie* dan benteng *Fort Marinane* yang terletak di seberang keraton dan dipisahkan oleh Sungai Kapuas. Pola tata ruang kota yang demikian dimaksudkan untuk memisahkan sosio kultural dengan penduduk pribumi.¹¹

Kebijaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Hindia Belanda telah diundangkan melalui *Staatsblad* No. 2 Tahun 1855 yang mana pengaturan dan pengurusan terkait penduduk pribumi diatur dalam pasal 67 dan pasal 68. Pada pasal 67 berisi tentang penyerahan kekuasaan daerah kepada penguasa yang haknya diakui oleh Gubernur Jendral. Dari hal ini sehingga dapat diketahui jika

⁹ Hassanudin, *Politik dan Perdagangan Kolonial Belanda di Pontianak*, *op. cit.* hlm. 208.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 208.

¹¹ Syafaruddin Usman, *op. cit.* hlm. 53.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Pemerintahan Hindia Belanda yang ada di Indonesia bersifat sentralisasi dan dijalankan dengan azas dekonsentrasi.¹²

Pada Tahun 1903 dibentuk undang-undang *Decentralisatie Wet* yang digunakan untuk mengatur urusan dari pusat ke daerah. Disebabkan karena perkembangannya yang sempit membuat dikeluarkan *Decentralisatie Besluit* pada tahun 1905 untuk membantu jalannya *Decentralisatie Wet*. Pada masa tersebut dikeluarkan juga *Locale Raden Ordonnantie*, yang merupakan peraturan pelaksanaan untuk menentukan struktur, status, kewenangan dari pembentukan dewan-dewan.¹³

Pada bidang ketatanengaraan, Kalimantan Barat pada tahun 1919 dalam *Staatsblad* 1919 Nomor 512 diberi status sebagai *Keresidenan Borneo Barat* dan semenjak itu Pontianak memiliki status ibu kota *Keresidenan*. Implementasi dari *Decentralisatie Wet* memasuki tahun 1938 memberikan status *gewest* kepada Pontianak yang setingkat dengan status *gemeente* di Hindia Belanda, berdasarkan pada Besluit 30 Juni 1938 No. 21.¹⁴

Berita kekalahan Belanda tersebar di seluruh Indonesia tidak terkecuali Pontianak. Untuk menghindari menyebarnya berita kekalahan ini, surat kabar yang terbit di Pontianak baik dari wilayah Pontianak sendiri ataupun wilayah lain

¹² Dann Sugandha, *Masalah Otonomi dan Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Bandung: CV. Sinar Baru, 1981, hlm. 9.

¹³ *Ibid.*, hlm. 11.

¹⁴ Syafaruddin Usman, *op. cit.* hlm. 98.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

mendapat pemeriksaan yang ketat.¹⁵ Kekalahan Pemerintah Hindia Belanda membuat Jepang berhasil menguasai wilayah di Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Kedatangan Jepang di Kalimantan Barat disambut baik oleh rakyat. Kekuasaan yang tadinya dipegang oleh Belanda, secara cepat diambil alih oleh Tentara Jepang.¹⁶

Pemerintah Militer Jepang bertindak tegas dengan mewajibkan masyarakat memberikan hormat kepada orang Jepang dan tempat-tempat tertentu. Salah satu tempat yang wajib diberi hormat adalah tempat yang disebut *Yasukuni Jinja*¹⁷ (sekarang tempat ini lokasinya di depan Kodam XII Tanjungpura). Di tempat ini setiap orang yang lewat harus berhenti sebentar untuk memberikan *saikerei*.¹⁸

Pada masa Pemerintahan Militer Jepang, Pontianak dipegang oleh Angkatan Laut (*Kaigun*). Komando Angkatan Laut Jepang berpusat di Makasar dengan pemegang kendali adalah Komando Armada Selatan ke-2. Setelah

¹⁵ Bambang Suwondo, dkk., *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Barat*, Pontianak: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sejarah Kebangkitan Nasional Kalimantan Barat, 1978, hlm. 66.

¹⁶ Ya'achmad, dkk., *Sejarah Perlawanan Imperialisme dan Kolonialisme di Kalimantan Barat*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta, 1984, hlm. 66.

¹⁷ Sebuah Kuil Shinto milik Pemerintah Militer Jepang untuk menghormati arwah korban perang, salah satunya pada masa Restorasi Meiji.

¹⁸ Ya'achmad, dkk., *op.,cit*, hlm. 67.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

penarikan Angkatan Darat dari wilayah Kalimantan Barat, maka di mulailah kekuasaan Angkatan Laut yang lebih dikenal dengan nama *Minseibu*.¹⁹

Pada masa pendudukan Jepang kerja paksa untuk kebutuhan militer terus berlansung. Kerja paksa ini mengerahkan beribu-ribu rakyat di Kalimantan Barat, tidak peduli usia dan kondisinya. Kehidupan rakyat Kalimantan Barat semakin suram dengan adanya *Kebitai (Kepolisian)* dan *Kenpeitai (Kepolisian rahasia atau mata-mata Jepang)* yang mengawasi dan menahan mereka yang dianggap anti Jepang.²⁰

Peristiwa berdarah terjadi di Kalimantan Barat, yakni pada saat terjadi penangkapan secara massal terhadap pemuka gerakan bawah tanah. Seluruh pemuka masyarakat dan keluarga Kesultanan Pontianak menjadi korban dalam kekejaman Jepang tersebut. Tidak ada para pemuka masyarakat yang selamat dalam penangkapan anti Jepang, dan tidak ada pula pengadilan. Setelah menjalani interogasi mereka langsung dijatuhi hukum mati.²¹ Korban kekejaman Jepang ini ditemukan dengan kondisi yang tak lagi dapat dikenali identitasnya. Jumlah terbesar korban yang mati terdapat di Mandor.²²

Kekalahan Jepang dalam perang melawan sekutu memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk mengumandangkan Proklamasi Kemerdekaan Republik

¹⁹ *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Barat*, Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978/1979, hlm. 73.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 77.

²¹ *Ibid.*, hlm. 83.

²² Sekarang salah satu wilayah yang berada di daerah Kabupaten Ngabang (Landak).

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Indonesia pada tahun 1945. Pada rapat PPKI tahun 1945, setelah ditetapkan UUD 1945 oleh panitia kecil yang di ketuai oleh Otto Iskandardinata menyampaikan usulan 4 masalah yang perlu diselesaikan salah satunya pembentukan Komite Nasional Daerah (KND). Tugas yang dilakukan oleh KND awalnya masih belum jelas hingga pada rapat PPKI tanggal 23 Agustus 1945 menentukan secara jelas tugas dari KND yang dibentuk di seluruh Indonesia dengan pusatnya di Jakarta.²³

Pada awal Kemerdekaan RI gejolak politik berlangsung di seluruh wilayah di Indonesia. Kembalinya Pemerintah Belanda ke Indonesia melalui Letnan Gubernur Jenderal H. J. van Mook berusaha menguasai kembali Indonesia dengan memanfaatkan satuan etnis di wilayah otonom yang relatif kecil dan mengililingi pusat Republik. Pada saat itulah van Mook mulai memikirkan Borneo dan Timur Besar.²⁴

Pemerintah Belanda berusaha menghimpun kekuatan politiknya melalui Konferensi Malino pada tahun 1946. Konferensi tersebut merekomendasikan untuk membagi Borneo menjadi tiga daerah otonom yaitu Borneo Barat, Selatan dan Timur. Sayangnya pendapat tersebut hanya dimungkinkan sebagai wilayah ke empat di pedalaman Dayak untuk masa depan.²⁵

Pada masa Pemerintahan RIS keinginan untuk memiliki pemerintahan sendiri dari Pemerintah Daerah Kalimantan Barat ditunjukkan langsung dalam

²³ The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993, hlm. 43-44.

²⁴ Sita Van Bemmelen dan Remcon Raben, ed., *Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an*, Jakarta: KTILV, 2011, hlm. 168.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 170.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

salinan Surat Panji Rakyat No. 51 Tahun ke-2 memuat tentang rencana pembentukan anggaran dasar Kalimantan Barat untuk menjadi Daerah Istimewa Kalimantan Barat yang diterbitkan 13 Mei 1947.²⁶

Pada saat mundurnya Pemerintahan RIS, Badan Pemerintahan Kalimantan Barat memutuskan untuk menyerahkan segala bentuk pemerintahan kepada Residen Kalimantan Barat.²⁷ Penyerahan kekuasaan tersebut membuat tanggung jawab Pemerintahan Daerah di Kepalai oleh Residen Kalimantan Barat dan dibantu KND-KB. Pada tahun 1956 melalui Undang-Undang No. 25 menetapkan Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur dengan ketentuan umum yang berlaku. Dalam ketentuan umum tersebut dijelaskan untuk sementara waktu wilayah dibagi menjadi tiga daerah tingkat 1 yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.²⁸

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka diperlukannya rumusan masalah untuk melanjutkan penelitian, sehingga topik sejarah yang diangkat tetap fokus pada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang ditentukan dalam penelitian ini adalah bagaimana Dinamika Pemerintahan Daerah Kalimantan Barat pada tahun 1947 sampai 1956 ?

²⁶Surat Kabar, *Panji Rakyat* No. 51 Tahun ke-2, 1947.

²⁷ Badan Pemerintahan Daerah Bagian Kalimantan Barat, Arsip Nasional Republik Indonesia, 1950.

²⁸Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, Arsip Nasional Republik Indonesia 1956.

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang hendak diperoleh dari penulisan ini sebagai berikut:

- a) Untuk memahami dinamika pemerintahan daerah Kalimantan Barat pada tahun 1947 sampai 1956.
- b) Untuk memahami proses berdirinya Provinsi Kalimantan Barat yang berkembang pada tahun 1947 sampai 1956.

Dari tujuan yang telah dipaparkan, maka manfaat dari penulisan ini yang diharapkan penulis untuk bisa tersampaikan kepada khalayak umum adalah berikut:

- a) Secara akademis mampu memberikan sumbangan informasi pada kepada penggiat Sejarah, terutama bagi yang menekuni penulisan sejarah di Kalimantan Barat, tentang dinamika pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu tahun 1947 sampai 1956.
- b) Secara historiografi memberikan informasi terkait peristiwa sejarah yang berlangsung dalam perjalanan berdirinya pemerintahan daerah di Kalimantan Barat pada tahun 1947-1956

1.4 Batasan Dan Ruang Lingkup

Pada penelitian sejarah ditentukan batasan dan ruang lingkup penelitian yang bertujuan untuk, mengetahui peristiwa yang terjadi dalam rentang waktu dan tempat kejadian peristiwa. Ruang lingkup dari penelitian ini yaitu di Pontianak,

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kalimantan Barat terkait dinamika pemerintahan yang berlangsung selama tahun 1947-1956.

Batasan waktu yang dipilih yaitu pada tahun 1947 karena dilaksanakannya penandatanganan ketentuan dasar dari Kalimantan Barat yang dilakukan di Kota Pontianak. Penandatanganan tersebut dihadiri oleh Nadorst, Sekretaris dari Dewan Penasihat Kalimantan Barat. Penandatanganan tersebut juga menjadi salah satu bukti berdirinya Kalimantan Barat menjadi sebuah Daerah Istimewa Kalimantan Barat yang memiliki aturan dasar dan ketentuan Pemerintahan Daerah. Pemilihan batasan waktu tahun 1956 karena berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

1.5 Tinjauan Pusataka

Buku *Kota Pontianak: Dolo, Kini, dan Mendatang* karya Syafarudin Usman memberikan banyak gambaran tentang perkembangan wilayah Kalimantan Barat, terutama kota Pontianak sebagai Pusat Pemerintahan Daerah di Kalimantan Barat. Karya yang ditulis oleh Syafarudin Usman ini diringkas sebaik mungkin, sehingga mampu menyajikan tahapan perkembangan sejarah di Kalimantan Barat pada masa Kesultanan Pontianak hingga sekarang. Pada buku tersebut dilengkapi beberapa gambar sejarah yang menunjukkan tata letak bangunan yang menjadi tempat penting, sebagai pengingat sejarah di Kalimantan Barat, dan beberapa hal yang ditekankan terutama pada saat wilayah Kalimantan Berada dibawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Buku *Pontianak Masa Kolonial* karya Hasanuddin juga menyumbangkan banyak informasi terkait sumber yang digunakan dan menekankan pada perkembangan ekonomi di Kalimantan Barat pada masa kolonial. Terdapat juga paparan mengenai pelayaran niaga yang berlangsung di Kalimantan Barat, dan hubungan kerjasama perdagangan yang dilakukan oleh Kalimantan Barat dengan VOC. Penekanan yang utama dalam buku ini, menampilkan ketertarikan VOC dan EIC untuk datang melakukan kerjasama dengan Kalimantan Barat, peranan para pedagang Cina dalam menyokong perekonomian di Kalimantan Barat.

Buku *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Kalimantan Barat* yang ditulis oleh Ya'achmad, dan kawan kawan, memberikan gambaran tentang perjuangan masyarakat Kalimantan Barat yang berjuang untuk lepas dari kekuasaan kolonialisme di Kalimantan Barat. Buku ini menekankan tentang perlawanan yang dilakukan masyarakat di Kalimantan Barat, perlawanan rakyat tersebar diseluruh penjuru, dan pembentukan organisasi masyarakat di Kalimantan Barat. Sumbangi terbesar buku ini, menunjukkan bagaimana rakyat Kalimantan Barat mempertahankan wilayah dari ekspansi kolonialisme dan taktik yang digunakan untuk bertahan.

Buku *Sejarah dan Geografis Daerah Sungai Kapuas Kalimantan Barat* karya Enthoven yang dialihbahasakan oleh P. Yeri, membuka pikiran penulis tentang peranan besar Sungai Kapuas di Kalimantan Barat sebagai jalur transportasi masyarakat. Buku ini juga menjelaskan perkembangan Afdeeling dan Onderafdeeling di Kalimantan Barat. Perkembangan yang dijelaskan mulai dari lokasi, susunan pemerintahan afdeeling atau onderafdeling, pendudukan, hingga

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

dinasti suku dayak yang memiliki peranan besar dalam pembangunan. Setiap hal kecil dari sebuah afdeeling ditulis secara detail dalam buku ini, sehingga sebagai pembaca dapat mengetahui beberapa daerah yang sebelumnya berstatus sebagai onderafdeeling telah berdiri sebagai kabupaten (sekarang).

1.6 Kerangka Konseptual

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan pemerintahan sebagai sebuah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Pemerintahan sendiri dalam arti luas merupakan sebuah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di suatu wilayah. Pemerintahan yang berlangsung tidak hanya berfokus pada Pemerintah Pusat namun juga membagi tugas pada Pemerintahan Daerah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, saling berhubungan untuk menjalankan kerjasama, sehingga aktivitas pemerintahan daerah selalu terpantau oleh pemerintah pusat.

Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi daerah. Pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengubah paradigma sentralisasi pemerintahan ke arah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab. Paradigma yang berubah membantu Pemerintah Daerah untuk membuktikan kesanggupannya dalam melaksanakan

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

urusan-urusan pemerintahan lokal sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat daerah.²⁹

Pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menjalankan fokus pekerjaan dalam membangun daerah dan negara. Namun, secara tidak langsung dengan adanya Pemerintahan Daerah terjadi persaingan diantara daerah Indonesia, saling menunjukkan peluang baik dalam mengembangkan daerahnya.

Perolehan Pemerintahan Daerah di dasarkan pada asas otonomi daerah yang telah berkembang sejak Pemerintahan Belanda di Indonesia. Pada masa Pemerintahan Belanda terlebih dulu mengatur susunan pemerintahan dalam undang-undang *Reglemen Op het Beleid der Regering Van Nederlands Indie* (Reglemeen tentang Kebijaksanaan Pemerintah Hindia Belanda). Undang-Undang yang mengatur pemerintahan pada masa Pemerintahan Belanda, sebelumnya Pemerintah Belanda menggunakan ekstrim sentralitis, meskipun pada umumnya di Negeri Belanda pemerintahan menggunakan asas sentralitis namun di negeri jajahan terlihat ciri desentralisasi.³⁰ Aktivita pemerintah yang dilakukan semuanya terfokus pada Pemerintahan Pusat, untuk mengadakannya otonom hanya bersifat tertutup. Pengertian otonomi dalam hal ini adalah wewenang yang diberikan perangkat lebih atas kepada perangkat lokal untuk mengatur sendiri segala kepentingan daerah, terutama mengenai pemerintahan dan peraturan sendiri asal

²⁹ Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 14.

³⁰ Bayu Suryaningrat, *Sejarah Pemerintahan di Indonesia: Babak Hindia Belanda dan Jepang*, (Jakarta: Dewaruri Pres, 1981), hlm. 11.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Perombakan asas sentralisasi kearah desentralisasi pertama dilakukan oleh menteri van Dedem tahun 1893 dengan mengajukan rancangan undang-undang ke parlemen Belanda, dimana isinya memberi kemungkinan dibentuknya dewan-dewan setempat atau bagian dari wilayah, sayangnya undang-undang tersebut gagal karena parlemen Belanda bubar. Pengajuan rancangan desentralisasi juga diajukan oleh dua orang menteri berikutnya, yang pertama Crème pada tahun 1890 dan kedua van Asch van Wijck tahun 1902, kandas di Parlemen. Pada masa A. W. F Indenburg menjadi menteri koloni di Parlemen Belanda, kembali mengajukan rancangan yang sama. Penjelasan terkait desentralisasi yang dimaksud adalah pengelolaan keuangan daerah yang terpisah dari pemerintah pusat di Batavia. Menurut rancangan A.W. F Indenburg secara tegas bahwa akan dibentuk daerah-daerah yang mengurus keuangannya sendiri dengan bantuan dewan lokal yang mampu mengembangkan daerah secara mandiri. Rancangan yang diajukan oleh A. W. F Indenburg diterima oleh Parlemen Belanda dan menjadi undang-undang yang dikenal dengan *Decentralisatie Wet* Tahun 1903, dipublikasikan melalui *Nederlandsche Staatblad* tahun 1903 No. 129 dan *Indische Staatblad* No. 329.³¹

Pada penelitian ini fokus menggunakan pendekatan ilmu politik. Selain itu pengertian pemerintahan sendiri menurut Ramlan Surbakti adalah pemerintahan dan pemerintah berbeda artinya, dimana pemerintan menyangkut tugas dan

³¹ Teti Hestiliani, "Secentralisatie Wet van Nederland Indies 1903", *Istoria* Vol. 15 No. 2, 2019, hlm. 212.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

wewenang, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara. Pemerintahan yang berlangsung di Kalimantan Barat memiliki banyak pengaruh politik yang luas dan banyak yang masih tertinggal dari daerah yang berada dekat dengan pusat pemerintahan. Gejolak politik yang mempengaruhi pemerintahan di daerah Kalimantan Barat menarik minat penulis, dimana sedikitnya penelitian yang secara fokus membahas tentang pemerintahan daerah yang berlangsung di Kalimantan Barat.

1.7 Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam menjalankan sebuah penelitian harus memiliki struktur yang tertarapi atau yang disebut metode penelitian, sehingga seorang peneliti memerlukan metode penelitian untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal. Metode penelitian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebuah cara untuk mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam, masyarakat atau manusia, berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan.

Mencermati dari pengertian yang ditafsirkan dalam KBBI terkait metode penelitian berdasarkan dengan disiplin ilmu yang bersangkutan, maka dalam ilmu sejarah juga memiliki susunan metode penelitiannya sendiri. Kuntowijoyo membagi penelitian sejarah dalam 5 bagian yaitu:

1. Pemilihan Topik
2. Pengumpulan Sumber
3. Verifikasi (kritik sejarah, keasbasahan sumber, relevansi sumber)
4. Interpretasi (analisa dan sitensis)
5. Penulisan Sejarah (historiografi)

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Maka untuk memperkuat penelitian, penulis dibimbing untuk mampu menggunakan 5 tahapan dalam metode penelitian sejarah. Pertama penentuan topik, penulis memilih topik yang berhubungan dengan Pemerintahan Daerah, yang mana secara spesifik yaitu Sejarah Pemerintahan Daerah Kalimantan Barat Tahun 1947-1956.

Kedua penulis berusaha mengumpulkan sumber dari buku-buku yang telah diterbitkan, selain itu penulis juga memperoleh sumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia, dan Galeri Arsip Kalimantan Barat.

Ketiga adalah verifikasi atau kritik sumber. Verifikasi sendiri dilakukan dengan menguji keaslian dari sumber yang dimiliki termasuk keaslian dari sumber buku, Arsip Nasional Republik Indonesia dan Galeri Arsip Kalimantan Barat. Apabila sumber tidak sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, maka harus dieliminasi.

Keempat, akan dilakukan interpretasi dengan menganalisis sumber yang digunakan sehingga penulis bisa mengurutkan penggunaan sumber yang telah diperoleh mana terlebih dahulu. Adanya interpretasi mampu memberikan gambaran kepada penulis yang berhubungan dengan imajinasi penulis dalam menyusun jalannya peristiwa berdasarkan sumber yang digunakan. Dengan demikian setelah dilakukannya historiografi tulisan sejarah dapat dipahami dengan baik dan terstruktur.

Kelima atau langkah terakhir adalah historiografi atau penulisan sejarah, melalui historiografi, penulis menata tulisan dengan menggunakan kalimat yang mudah dipahami, karena tujuan dari penulisan sejarah mampu menyampaikan

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

peristiwa tersebut tidak hanya kepada para akademisi atau sejarawan, namun juga kepada masyarakat umum, sehingga diperlukannya penggunaan kata dan kalimat sebagaimana saat menyampaikan sebuah cerita, namun dalam sejarah cerita yang disampaikan berdasarkan sumber-sumber yang telah dikumpulkan dan diverifikasi keasliannya terlebih dulu.

1.8 Sistematika Penulisan

Rancangan penulisan terbagi dalam 4 bab, dalam masing-masing bab memiliki pembahasan khusus terkait sejarah Pemerintahan Daerah di Kalimantan Barat pada tahun 1946-1957.

Bab I berisi pendahuluan, terdiri atas: latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan dan ruang lingkup, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas Perkembangan Pemerintahan Daerah Kalimantan Barat pada Masa Sebelum Indonesia Merdeka yang dibagi kembali dalam beberapa sub bab, pertama awal terbentuknya pemerintahan daerah di Kalimantan Barat terbagi kedalam sub bab pembahasan yaitu:

1. Pemerintahan Masa Kesultanan Pontianak
2. Pengaruh VOC Pada Pemerintahan Kesultanan Pontianak
3. East India Company (EIC) di Pontianak
4. Terbentuknya Pemerintahan Daerah Kalimantan Barat
5. Pemerintahan Daerah Kalimantan Barat pada Kekuasaan Militer Jepang

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Bab III membahas Perkembangan Berdirinya Pemerintahan Daerah Kalimantan Barat Setelah Proklamasi Kemerdekaan Sampai Penetapan Otonomi Daerah Kalimantan Barat Tahun 1947-1956 yang akan dibagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut:

1. Masa Republik Indonesia 1945-1949
2. Masa Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949-1950
3. Masa Negara Kesatuan RI 1950-1956

Bab IV kesimpulan, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian ini.